

Konstruksi Masyarakat Sidoarjo tentang Konflik Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana Pasca Pelantikan Kepala Daerah Sidoarjo

Rizqullah Ananta Gavindyanan^{1*} Agus Machfud Fauzi²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISIPOL-Unesa

rizqullahananta.19101@mhs.unesaa.ac.id

Abstract

This study examines how the people of Sidoarjo construct the political conflict between Regent Subandi and Vice Regent Mimik Idayana following the 2025 regional leadership inauguration. Using a qualitative phenomenological approach, data were collected through in-depth interviews with ten informants representing diverse social and occupational backgrounds. The analysis applies Peter L. Berger and Thomas Luckmann's Social Construction of Reality theory, focusing on the processes of externalization, objectivation, and internalization. The findings reveal that public perceptions are shaped through social media, interpersonal discussions, and everyday interactions. Political tensions become an objective social reality through institutional events, including the rejection of the Regent's apology, unilateral civil servant (ASN) rotations, and legal disputes. Public interpretations vary across social groups: academics and community leaders view the conflict as a threat to good governance; students and youth respond with skepticism and political apathy; while grassroots communities perceive it as an elite power struggle that neglects public interests. The conflict has also weakened public services, including flood mitigation, road maintenance, and clean water provision, contributing to declining public trust and increasing political fatigue.

Keywords: Social Construction, Political Conflict, Regional Government, Public Trust, Public Services.

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat Sidoarjo mengonstruksi konflik politik antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana pasca pelantikan kepala daerah tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang mewakili beragam latar belakang sosial dan profesi. Analisis dilakukan menggunakan Teori Konstruksi Sosial atas Realitas dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terbentuk melalui media sosial, diskusi antarmasyarakat, dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Konflik politik kemudian berkembang menjadi realitas sosial melalui berbagai peristiwa institusional, seperti penolakan permintaan maaf Bupati, mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara sepihak, dan perselisihan hukum. Penafsiran masyarakat terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu akademisi dan tokoh masyarakat yang memandang konflik sebagai ancaman terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, mahasiswa dan pemuda yang menunjukkan sikap skeptis hingga apatis terhadap politik, serta masyarakat akar rumput yang menganggap konflik tersebut sebagai perebutan kepentingan elite yang mengabaikan kepentingan publik. Konflik ini juga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, seperti penanganan banjir, perbaikan jalan, dan layanan air bersih, sehingga memicu penurunan kepercayaan masyarakat serta meningkatnya kejenuhan politik.

Kata Kunci: Konstruksi Sosial, Konflik Politik, Pemerintahan Daerah, Kepercayaan Publik, Pelayanan Publik.

1. Pendahuluan

Sidoarjo merupakan kabupaten dengan kasus dan konflik Bupati yang sering sekali terjadi di tiap pergantian periode terjadi, mulai dari adanya kasus korupsi yang diduga kepada Bupati pada periode 2000 – 2010 yang pada masa jabatan tersebut dipimpin oleh Bapak Drs. Win Hendarso, M.Si, beliau terkena kasus korupsi dana kas daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2005–2007. dilanjutkan pada Bupati periode 2010–2015 & 2016–2021 yang pada periode tersebut dinahkodai oleh Bapak Saiful Ilah, s.h., M.Hum, beliau terkena dua kasus dengan kasus pertama adalah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK dengan dakwa menerima suap dari kontraktor dan penerimaan gratifikasi dari berbagai pihak (Swasta, ASN, dan Direksi BUMD). Setelah Saiful Ilah Sidoarjo lanjut memiliki Bupati yang kerap disapa Gus Muhdlor pada periode 2021–2024 yang pada akhirnya beliau terkena kasus korupsi pemotongan dana (ASN) di BPPD Sidoarjo (Sari dan Nugroho 2021).

Setelah beberapa kali Sidoarjo dilanda kasus bupati secara berturut – turut, Masyarakat Sidoarjo kembali harus memilih Bupati untuk dipercaya dan dari seringnya kasus, konflik dan segala hal yang ada pada bupati-bupati sebelumnya, pasangan dengan nama Subandi dan Mimik Idayana datang kepada publik dengan visi mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, visi tersebut cukup memberikan kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang sudah cukup sering dilanda oleh Bupati yang terjerat kasus dan konflik, Subandi dan Mimik Idayana pada akhirnya menjadi sebagai bupati terpilih untuk periode 2025–2030 pada 20 Februari 2025 bersama dengan 961 kepala daerah di Indonesia (Kurniawan 2022). Banyak masyarakat yang sebelumnya kecewa pada bupati-bupati sebelumnya dengan menebar banyak harapan kepada Bupati terpilih tersebut.

Sebulan pasca dilantik Subandi dan Mimik tepatnya pada bulan Maret, publik dikejutkan dengan beredar video Subandi yang dimana pada rekaman tersebut menyatakan anggota DPR hanya menghambur-hamburkan uang saja, dalam forum paripurna Subandi pada akhirnya meminta maaf akan tetapi, Fraksi Gerindra menolak permintaan maaf tersebut karena sikapnya dianggap tidak jelas. Mimik Idayana sebagai Ketua DPC Sidoarjo sekaligus Wakil Bupati Sidoarjo cukup membuat kejutan dengan mendukung fraksi partainya, dari awal mula tersebut mulai muncul berbagaim muncul konflik antar Bupati seperti Mimik yang langsung mengkritik Subandi, mutasi ASN yang tak melibatkan wakil bupati yang bahkan melebar sampai ke ranah hukum ditambah dengan dugaan penipuan yang dilaporkan oleh suami Bupati tersebut. Permasalahan tersebut menyebabkan adanya keresahan dan keheranan pada masyarakat khususnya yang dipimpin oleh kedua Bupati tersebut.

Masyarakat Indonesia diketahui hidup secara demokratis, semua golongan masyarakat atau kelas sosial memiliki hak dan kedudukan yang setara walaupun dalam kehidupan demokratis ini tetap dipimpin dan diatur oleh pihak kekuasaan negara yang dikenal dengan trias politica (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif), jika terjadinya konflik baik internal ataupun eksternal yang terjadi dalam kekuasaan negara tentu dampaknya sangat besar termasuk dengan pada masyarakatnya. Masyarakat pada umumnya merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama memperoleh kepentingan bersama yang sudah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang dipatuhi didalam lingkungan tersebut (D. Prasetyo dan Irwansyah, 2020). Masyarakat yang harus patuh didalam norma-norma, adat istiadat yang bisa diartikan jika dikaitkan dengan lingkup kabupaten berarti dipimpin oleh sistem pemerintahan yang ada yaitu Bupati, tentu dari adanya konflik antar Bupati tersebut memicu adanya dampak dari kehidupan bermasyarakat yang ada. Mulai dari tata kelola pembangunan daerah, sistem pemerintahan, dan janji yang sudah

disampaikan pasca pemilihan bupati yang belum terealisasi. Siti Zuhrob pernah menyampaikan bahwa disharmoni hubungan antara kepala daerah dengan wakilnya mengakibatkan ketidakstabilan atau instabilitas politik sehingga pemerintahan daerah tidak efektif (Ananda dan Saputra 2024). Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Sulardi dan Tri Sulistyaningsih, 2017).

Banyak permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat kabupaten Sidoarjo dan diharapkan untuk bisa diselesaikan oleh kepala daerah setempat seperti contohnya adalah Banjir musiman disertai drainase buruk, layanan air bersih (PDAM) yang kerap keruh, dan aspal yang bergelombang akibat dilintasi kendaraan berat dan kualitas aspal yang cepat mengelupas jika terendam air (Times Indonesia, 2026). Selain permasalahan umum jika dilihat dari berbagai bidang seperti sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan masih banyak lagi, segala bidang menjadi ikut terdampak karena adanya konflik diantara kedua kepala daerah mereka (Bupati dan Wakil Bupati).

Fenomena inilah yang hari ini sedang membayangi dinamika politik di Kabupaten Sidoarjo (Prasetyo dan Rahmawati 2021). Pasca-pelantikan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, perhatian publik tidak hanya tertuju pada program kerja seratus hari, melainkan pada rumor dan realitas gesekan yang terjadi di antara keduanya (Firmansyah dan Yulianto 2024). Sebagai dua figur yang memiliki basis massa kuat dan latar belakang politik yang dinamis, ketegangan di pucuk pimpinan ini menjadi konsumsi publik yang tak terhindarkan (Hidayat dan Lestari 2022). Media lokal dan ruang-ruang digital dipenuhi oleh spekulasi, mulai dari perebutan pengaruh posisi birokrasi hingga perbedaan prinsip dalam pengambilan kebijakan strategis daerah (Aulia dan Wijaya 2025).

Masyarakat Sidoarjo bisa melihat konflik ini sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar peristiwa politik (Wulandari 2023). Sidoarjo adalah tempat yang memiliki banyak karakteristik masyarakat yang berbeda, perpaduan antara masyarakat industri, santri yang agamis, dan warga kota. Reaksi terhadap masalah politik lokal sangat beragam dan berubah karena struktur sosial yang berbeda ini. Masyarakat bukanlah konsumen informasi lagi (Putra dkk 2023). Warga Sidoarjo aktif menyerap, menafsirkan, dan akhirnya membentuk makna terseni atas konflik Subandi dan Mimik Idayana melalui percakapan di warung kopi, diskusi komunitas, dan perdebatan di media sosial (Ramadhan 2025).

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait konflik pemerintah, konstruksi masyarakat bukan yang pertama kali dan satu-satunya yang pernah diteliti. Ada beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan dan memiliki keterkaitan tetapi juga memiliki perbedaan dan keragaman masing-masingnya. Fungsi dari adanya penelitian terdahulu ini adalah sebagai referensi serta acuan peneliti dalam merangkai susunan rencana dasar penelitian. Penelitian terdahulu dapat berupa jurnal, artikel dan skripsi, Berikut adalah tabel penelitian terdahulu.

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari dan Nugroho (2021)	Konstruksi Opini Publik terhadap Konflik Elite Politik Daerah melalui Media Sosial	Kualitatif (analisis wacana)	Media sosial menjadi ruang utama pembentukan konstruksi masyarakat terhadap

				konflik elite politik dan membentuk persepsi publik.
2	Prasetyo dan Rahmawati (2021)	Disharmoni Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Studi kasus kualitatif	Konflik berdampak pada efektivitas birokrasi, pelayanan publik, dan stabilitas pemerintahan.
3	Kurniawan (2022)	Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Isu Politik Lokal Pasca Pilkada	Kualitatif	Pengalaman, media massa, dan interaksi sosial membentuk persepsi masyarakat.
4	Hidayat dan Lestari (2022)	Peran Media Online dalam Membentuk Persepsi Publik terhadap Konflik Politik Lokal	Deskriptif kualitatif	Media online memengaruhi opini dan persepsi publik.
5	Putra dkk. (2023)	Konflik Elite Politik dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik pada Pemerintahan Daerah	Mixed methods	Konflik menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
6	Wulandari (2023)	Opini Publik terhadap Konflik Pemerintahan Daerah di Era Digital	Fenomenologi	Persepsi dibentuk melalui pengalaman, media massa, dan media sosial.
7	Firmansyah dan Yulianto (2024)	Komunikasi Politik Kepala Daerah dalam	Studi kasus	Komunikasi politik yang tidak efektif

		Membangun Kepercayaan Publik		meningkatkan konflik internal.
8	Ananda dan Saputra (2024)	Persepsi Masyarakat terhadap Konflik Elite Politik Pasca Pemilihan Kepala Daerah	Kualitatif deskriptif	Konflik dipandang menghambat pembangunan dan pelayanan publik.
9	Ramadhan (2025)	Media Sosial dan Pembentukan Konstruksi Politik Masyarakat dalam Konflik Pemerintahan Daerah	Kualitatif	Media sosial mempercepat pembentukan opini publik.
10	Aulia dan Wijaya (2025)	Respon Masyarakat terhadap Konflik Kepala Daerah Pasca Pelantikan	Studi kasus kualitatif	Konflik memengaruhi kepercayaan masyarakat dan interpretasi publik.

2.2 Masyarakat dalam Perspektif Konstruksi Sosial

Dalam perspektif konstruksi sosial, masyarakat tidak dipandang sebagai sekumpulan individu yang hanya menerima realitas sosial secara pasif, melainkan sebagai aktor yang secara aktif membentuk, menafsirkan, dan mereproduksi realitas melalui proses interaksi sosial. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial merupakan hasil dialektika yang berlangsung secara terus-menerus melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi, individu mengekspresikan pemikiran, pengalaman, dan pandangannya terhadap suatu fenomena melalui berbagai bentuk interaksi. Selanjutnya, proses tersebut mengalami objektivasi ketika berbagai pandangan yang berkembang diterima secara kolektif dan menjadi kenyataan sosial yang dianggap objektif oleh masyarakat. Tahap terakhir adalah internalisasi, yaitu ketika individu menyerap dan menjadikan realitas sosial tersebut sebagai bagian dari cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Perspektif konstruksi sosial menunjukkan bahwa realitas mengenai konflik politik tidak hanya ditentukan oleh tindakan para *elite* politik, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memaknai dan mereproduksi peristiwa tersebut dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan sekadar persoalan internal pemerintahan, melainkan telah berkembang menjadi realitas sosial yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, penilaian terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, serta harapan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam penelitian ini, konsep konstruksi sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana

masyarakat Sidoarjo membentuk pemahaman mengenai konflik politik melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sehingga menghasilkan beragam pandangan sesuai dengan karakteristik sosial masing-masing kelompok masyarakat.

2.3 Konsep Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan teori yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karya *The Social Construction of Reality* (1966). Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang muncul secara alamiah atau bersifat mutlak, melainkan dibentuk melalui proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus di dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu memiliki pengalaman, nilai, dan pengetahuan yang berbeda sehingga cara memandang suatu fenomena sosial juga akan berbeda. Oleh karena itu, realitas sosial dipahami sebagai hasil kesepakatan bersama yang lahir dari proses komunikasi, interaksi, dan pertukaran makna antarmanusia (Berger & Luckmann, 1966).

Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa pembentukan realitas sosial berlangsung melalui tiga proses dialektis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan tahap ketika individu mengekspresikan pemikiran, pengalaman, serta penafsirannya terhadap suatu peristiwa ke dalam kehidupan sosial. Pandangan tersebut kemudian berkembang melalui berbagai bentuk komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial. Selanjutnya, proses tersebut memasuki tahap objektivasi, yaitu ketika hasil interaksi sosial diterima secara luas sehingga menjadi kenyataan yang dianggap objektif oleh masyarakat. Pada tahap ini, suatu peristiwa tidak lagi dipandang sebagai pengalaman individu, melainkan telah menjadi bagian dari realitas sosial yang diakui bersama. Tahap terakhir adalah internalisasi, yaitu proses ketika individu menyerap realitas yang telah terbentuk tersebut ke dalam kesadarannya sehingga memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari (Berger & Luckmann, 1966).

Dalam penelitian mengenai konflik antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, teori konstruksi sosial digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Kabupaten Sidoarjo membentuk makna terhadap konflik politik yang terjadi. Berbagai informasi mengenai konflik diperoleh masyarakat melalui pemberitaan media massa, media sosial, diskusi di lingkungan keluarga, hingga percakapan di ruang publik seperti warung kopi. Informasi tersebut tidak diterima secara pasif, melainkan diolah berdasarkan pengalaman pribadi, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, dan kepentingan masing-masing individu. Proses tersebut menghasilkan beragam penafsiran yang menunjukkan bahwa realitas mengenai konflik politik dibangun melalui interaksi sosial, bukan hanya ditentukan oleh tindakan para aktor politik. Dengan demikian, konflik kepala daerah berkembang menjadi sebuah realitas sosial yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, penilaian terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, serta persepsi masyarakat mengenai pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dikondensasikan dengan cara memilih, mengelompokkan, serta menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antarkategori yang ditemukan di lapangan. Tahap terakhir adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi. Analisis data juga dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sehingga dapat menjelaskan proses masyarakat Sidoarjo dalam membangun makna terhadap konflik antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami bagaimana masyarakat Kabupaten Sidoarjo mengonstruksi makna terhadap konflik politik antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana pasca pelantikan kepala daerah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman, pandangan, dan interpretasi masyarakat terhadap fenomena yang sedang berlangsung. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan sepuluh informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keberagaman latar belakang profesi, usia, tingkat pendidikan, serta wilayah tempat tinggal sehingga dapat merepresentasikan berbagai perspektif masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan konflik politik tersebut. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis hasil penelitian kemudian diinterpretasikan menggunakan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, untuk menjelaskan proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap konflik politik serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil dan Pembahasan

4.1 Karakteristik Informan Secara Umum

No	Kode	Jenis Kelamin	Usia	Kecamatan	Profesi / Latar Belakang
1	AR	Laki-laki	42	Sidoarjo	Pengamat Politik Lokal & Akademis
2	SW	Laki-laki	55	Waru	Tokoh Masyarakat / Ketua RW
3	DA	Perempuan	21	Sukodono	Mahasiswa Ilmu Sosial
4	MN	Laki-laki	38	Taman	Pedagang Kaki Lima (PKL)
5	BP	Laki-laki	29	Gedangan	Karyawan Swasta Industri
6	KH	Laki-laki	48	Candi	Tokoh Agama / Pengurus Pesantren
7	RT	Perempuan	34	Krian	Ibu Rumah Tangga & Pelaku UMKM

8	SL	Laki-laki	50	Sedati	Pembudidaya Tambak / Nelayan
9	WN	Perempuan	26	Buduran	Pegawai Honorer Instansi Daerah
10	HR	Laki-laki	45	Porong	Sopir Angkutan Umum / Logistik

4.2 Hasil dan Pembahasan Proses Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Konflik Kepala Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dikonstruksi masyarakat melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sesuai teori Berger dan Luckmann. Pada tahap eksternalisasi, masyarakat memperoleh informasi melalui media sosial, pemberitaan, serta interaksi langsung di lingkungan sosial sehingga memunculkan beragam opini mengenai konflik tersebut. Selanjutnya, objektivasi terjadi ketika konflik dianggap sebagai fakta sosial yang nyata melalui berbagai peristiwa, seperti perbedaan sikap politik, mutasi ASN, dan proses hukum yang berkembang. Tahap internalisasi memperlihatkan bahwa masyarakat memaknai konflik berdasarkan latar belakang sosial, pekerjaan, dan pengalaman masing-masing sehingga menghasilkan persepsi yang beragam terhadap kualitas kepemimpinan daerah.

4.3 Hasil dan Pembahasan Dampak Konflik terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa disharmoni antara kepala daerah memberikan dampak terhadap efektivitas birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Konflik menyebabkan koordinasi antarperangkat daerah menjadi kurang optimal, muncul ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas ASN, serta menurunkan efektivitas pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berimplikasi pada lambatnya pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Dari perspektif konstruksi sosial, masyarakat menilai bahwa konflik politik tidak hanya menjadi persoalan elite, tetapi juga memengaruhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Persepsi tersebut terbentuk melalui pengalaman masyarakat dalam mengamati proses birokrasi yang dianggap kurang responsif terhadap berbagai kebutuhan publik.

4.4 Hasil dan Pembahasan Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik politik turut memperkuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman historis masyarakat Sidoarjo yang pernah menghadapi berbagai kasus hukum yang melibatkan kepala daerah sebelumnya. Akibatnya, konflik yang terjadi saat ini dipandang sebagai pengulangan pola politik yang belum menghasilkan perubahan signifikan. Kondisi tersebut memunculkan kejenuhan politik, terutama pada masyarakat yang berharap pemerintah lebih berfokus pada penyelesaian persoalan publik dibandingkan persaingan politik. Dengan demikian, konflik elite tidak hanya memengaruhi stabilitas pemerintahan, tetapi juga membentuk sikap skeptis masyarakat terhadap efektivitas kepemimpinan daerah.

4.5 Sintesis Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, konstruksi sosial masyarakat terhadap konflik kepala daerah bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing kelompok sosial. Kelompok akademisi

cenderung menilai konflik dari aspek tata kelola pemerintahan, generasi muda memandangnya sebagai indikator menurunnya integritas politik, sedangkan masyarakat akar rumput lebih menitikberatkan pada dampaknya terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan sehari-hari. Perbedaan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa realitas sosial terbentuk melalui pengalaman, interaksi, serta kepentingan setiap kelompok. Oleh karena itu, penyelesaian konflik politik memerlukan komunikasi yang efektif dan kolaborasi antarpemimpin agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat dipulihkan serta pelayanan publik kembali berjalan secara optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data lapangan dan teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann, penelitian ini menyimpulkan bahwa disharmoni politik antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dikonstruksi masyarakat melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Konflik dipersepsikan berbeda oleh akademisi, generasi muda, dan masyarakat akar rumput sesuai latar sosial masing-masing. Akademisi menilai konflik mengganggu tata kelola pemerintahan, generasi muda menjadi skeptis terhadap politik, sedangkan masyarakat bawah melihatnya sebagai pertikaian elite yang merugikan rakyat. Dampaknya meliputi menurunnya kualitas pelayanan publik, terganggunya birokrasi, serta meningkatnya krisis kepercayaan dan kejenuhan politik di Kabupaten Sidoarjo.

Daftar Pustaka

- Ananda, A., & Saputra, D. (2024). Persepsi masyarakat terhadap konflik elite politik pasca pemilihan kepala daerah.
- Aulia, R., & Wijaya, M. (2025). Respon masyarakat terhadap konflik kepala daerah pasca pelantikan.
- Firmansyah, A., & Yulianto, R. (2024). Komunikasi politik kepala daerah dalam membangun kepercayaan publik.
- Hidayat, M., & Lestari, D. (2022). Peran media online dalam membentuk persepsi publik terhadap konflik politik lokal.
- Kurniawan, A. (2022). Konstruksi sosial masyarakat terhadap isu politik lokal pasca Pilkada.
- Prasetyo, A., & Rahmawati, S. (2021). Disharmoni kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam perspektif tata kelola pemerintahan daerah.
- Putra, R., Santoso, B., & Wijayanti, D. (2023). Konflik elite politik dan dampaknya terhadap kepercayaan publik pada pemerintahan daerah.
- Ramadhan, M. (2025). Media sosial dan pembentukan konstruksi politik masyarakat dalam konflik pemerintahan daerah.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2021). Konstruksi opini publik terhadap konflik elite politik daerah melalui media sosial.
- Wulandari, N. (2023). Opini publik terhadap konflik pemerintahan daerah di era digital.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026. https://bappeda.sidoarjab.go.id/images/files/force.php?file=FINAL+%28DOK%2BPERDA%29+Perda_2_TH_2021_RPJMD+Sidoarjo.pdf
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (n.d.). Kabupaten Sidoarjo. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sidoarjo/>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sidoarjo. (n.d.). Profil Kabupaten Sidoarjo. <https://ppid.sidoarjokab.go.id/template-1/007/1715742715>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. (2025). Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2025. <https://sidoarjokab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/66b10575ba6ae672090be70b/kabupaten-sidoarjo-dalam-angka-2025.html>

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026. <https://bappeda.sidoarjokab.go.id>